

BAB II

INDONESIA DALAM MASA TRANSISI DAN KONDISI EKONOMI PADA ERA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Tahun 1998 adalah tahun terberat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat krisis moneter di ASIA yang dampaknya sangat terasa di Indonesia. Nilai rupiah yang semula 1 US\$ senilai Rp. 2.000,- menjadi sekitar Rp. 10.000,- mencapai Rp. 12.000,- (5 kali lipat penurunan nilai rupiah terhadap dolar). Hutang Negara Indonesia yang jatuh tempo harus dibayar dalam bentuk dolar, menjadi lima kali lipatnya karena uang yang dimiliki berbentuk rupiah dan harus dibayar dalam bentuk dolar Amerika. Ditambah lagi dengan hutang swasta yang kemudian harus dibayar Negara Indonesia sebagai syarat untuk mendapat pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Tercatat hutang Indonesia menjadi US\$ 70,9 milyar (US\$20 milyar adalah hutang komersial swasta). Pembangunan ekonomi periode Orde Reformasi (1998 – 2004) berjalan tanpa arah. Masa tahun 1998 – 2004 adalah masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang ditandai dengan silih bergantinya Presiden RI dalam waktu relatif singkat. Dari B.J. Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999), Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001) kemudian Megawati (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)¹.

¹ analisis-kondisi-ekonomi-politik-indonesia-tahun. Eddy Prayitno (diakses 18 Juli 2010) dari <http://pmiigadjahmada.wordpress.com>

Secara politis, kondisi Indonesia memasuki periode Orde Reformasi semakin membaik. Demokrasi bisa berjalan baik, seluruh rakyat Indonesia mendapatkan haknya untuk memilih dan dipilih dengan bebas tanpa tekanan dari siapapun serta dijamin keamanannya di masa reformasi ini. Partai politik tumbuh subur, tercatat sebanyak 42 partai politik peserta pemilu tahun 2004, yang kemudian bertambah lagi dari tahun ke tahun. Setiap warga negara bebas berbicara dan menyampaikan pendapatnya baik melalui media massa maupun aksi-aksi demonstrasi dengan dibingkai aturan hukum yang berlaku. Semua itu tidak didapat di rezim Orde Baru. Proses otonomi daerah (desentralisasi kekuasaan) sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sudah dilaksanakan dengan proses pemilihan kepala daerah melalui, praktek nepotisme sedikit demi sedikit berkurang sehingga aktor ekonominya berusaha secara kompetitif. Periode Orde Reformasi transaksi informasi dan alokasi sumber daya diserahkan pada pasar, aktor ekonominya kompetitif, desentralisasi, internasionalis, melalui insentif ekonomi dan kepemilikan individu dijamin, sehingga bisa disimpulkan berarti prosesnya menjauhi kutub hegemoni.

A. Indonesia Sebelum Masa Jabatan Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla

Kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2003 tercatat pertumbuhan ekonomi 4,88 %, inflasi 5,06 cadangan devisa 36,3 USD milyar pada akhir tahun, kurs rupiah terhadap dolar berada pada kisaran Rp 8.330, total penerimaan pemerintah 340,7

trilyun rupiah pada akhir tahun dan laju inflasi rata-rata mencapai 8,2% per tahun. Sedangkan kondisi sosial ekonomi tidak ada gejolak yang berarti pada masyarakat. Harga bahan pokok berada pada kisaran yang dapat dijangkau. Inilah yang menjadikan salah indikator keberhasilan dalam pemerintahan pada masa tersebut. Namun dalam pemerintahan tersebut juga masih didapatkan beberapa masalah seperti masih rendahnya pertumbuhan penduduk pasca krisis yakni sekitar 4,5 % per tahun, masih rendahnya daya saing industri di Indonesia dan terjadinya gejala industrialisasi di berbagai daerah. Padahal sektor industri adalah salah satu sektor penting penggerak perekonomian nasional².

Akhir tahun 2004, kinerja ekonomi masih menunjukkan perkembangan yang membaik, walaupun menghadapi tantangan eksternal dan internal yang cukup berat. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8 persen, laju inflasi sebesar 7 persen. Nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2004 rata-rata Rp8.900 per dolar Amerika Serikat. Tingkat suku bunga SBI-3 bulan sebesar 7,5 persen. Di samping itu, tingkat harga dan produksi minyak mentah Indonesia masing-masing mencapai rata-rata US\$37,17 per barel dan 1,04 juta barel per hari. Terkait dengan indikator ekonomi makro tersebut, perkembangan dari sisi fiskal yang ditunjukkan dari besaran-besaran APBN dapat terkendali. Dari realisasi sementara pencapaian APBN 2004, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp407,8 triliun, yang berarti sekitar Rp4,1 triliun lebih tinggi

² Ketimpangan ekonomi kian melebar, Efendi (diakases 18 Juli 2010) dari

dari perkiraannya dalam APBN-P 2004. Lebih tingginya realisasi pendapatan negara terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan negara bukan pajak yang realisasinya mencapai Rp126,7 triliun, atau 2,3 persen di atas sarannya dalam APBN-P 2004 terkait dengan kenaikan harga minyak mentah Indonesia. Sementara itu, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp280,8 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sekitar 0,6 persen dari yang direncanakan dalam APBN-P 2004.

Di sisi belanja negara, realisasinya diperkirakan mencapai Rp435,6 triliun, yang berarti lebih tinggi sekitar Rp5,6 triliun atau naik sekitar 1,3 persen dari perkiraan dalam APBN-P 2004. Kenaikan realisasi belanja negara tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pengeluaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) sekitar 16 persen dari yang direncanakan dalam APBN-P 2004 terkait dengan lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional. Dari realisasi pendapatan negara sebesar Rp407,8 triliun dan belanja negara sebesar Rp435,6 triliun, maka defisit anggaran dalam APBN 2004 Rp27,8 triliun (1,4% PDB). Pencapaian tersebut berarti sedikit lebih tinggi dari perkiraan semula sebesar Rp26,3 triliun (1,3% PDB). Untuk menutup defisit anggaran di atas, dibiayai dari dalam negeri sebesar Rp42,9 triliun dan pembiayaan luar negeri sebesar negatif Rp15,1 triliun³.

³ Pelaksanaan APBN 2004 Hingga 31 Desember 2004 Tetap Terkendali, Marwanto Harjowiryono (diakses 18 juli 2010) dari <http://www.depkeu.go.id/ind/Data/spapbn3105.htm>

B. Program Kerja Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla

Indonesia pada masa awal kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla merupakan Indonesia yang menunjukkan kondisi politik ekonomi yang stabil dengan nilai inflansi 0,56 % (Oktober 2004, BPS), nilai tukar rupiah sebesar Rp 8.600 per dollar US (Oktober 2004, BPS), pertumbuhan ekonomi sekitar 5,13 % (2004, BPS) harga bahan pokok dikisaran yang dapat dijangkau oleh masyarakat merupakan salah satu modal awal yang bagus bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Menindak lanjuti apa yang mereka janjikan semasa pemilu, pemerintahan SBY-JK beserta para menterinya menggalakan program kerja 100 hari. Visi dan misi pasangan tersebut yaitu :

Visi

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Misi

1. Mewujudkan Indonesia yang aman damai
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis

3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera⁴

Melalui visi dan misi tersebut Susilo Bambang Yudhoyono beserta kabinetnya menyusun program kerja untuk dijalankan selama menjabat. Visi dan misi tersebut merupakan pedoman dan garis besar tujuan kabinet Susilo Bambang Yudhoyono dibentuk, dengan janji dalam masa kampanye serta tuntutan masyarakat pada saat itu, maka profesionalisme pada kabinet Indonesia bersatu akan sangat diperhitungkan pada masa selanjutnya. Inilah yang menjadikan program kerja 100 hari sebagai ajang pembuktian pemerintahan yang sedang menjabat. Masyarakat banyak berpendapat jika program kerja 100 hari dapat terlaksana dengan baik dan manfaatnya juga dapat langsung dirasakan secara nyata oleh masyarakat, maka pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono akan berjalan baik pada lima tahun mendatang. Dengan besarnya tuntutan pada profesionalisme kabinet Indonesia bersatu dalam menangani permasalahan yang sedang dihadapi bangsa ini maka Susilo Bambang Yudayana membuat program seperti berikut :

⁴ Visi, Misi dan Program Kerja yang disampaikan di sini merupakan versi ringkas dari buku yang berjudul "Membangun Indonesia Yang Aman, Adil, dan Sejahtera : Visi, Misi, dan Program" yang disusun oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan M. Jusuf Kalla (JK). Buku tersebut telah secara resmi dimasukkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komitmen dan janji mereka terhadap seluruh rakyat Indonesia. Buku tersebut merupakan dokumen publik yang bisa dibaca oleh semua pihak <http://buruhindia.wordpress.com/2008/05/15/visi-misi-dan-program-kerja-nemerintahan-sbv->

AGENDA DAN PROGRAM KERJA

Pertahanan, Keamanan, Politik, dan Sosial untuk Mewujudkan Indonesia yang Lebih Aman dan Damai

- Peningkatan saling percaya dan harmoni antar kelompok masyarakat dan terbangunnya masyarakat sipil yang semakin kokoh.
- Pencegahan dan penanggulangan separatisme.
- Penegakan hukum dan ketertiban yang tegas, adil, dan tidak diskriminatif.
- Pencegahan dan pemberantasan kriminalitas, termasuk produksi, penggunaan dan penyebaran narkoba.
- Pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme.
- Peningkatan kemampuan pertahanan negara.
- Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional.

Keadilan, Hukum, HAM dan Demokrasi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Adil dan Demokratis

- Pembentukan sistem dan politik hukum yang menjamin penegakan dan kepastian hukum.
- Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan kroni-isme.
- Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuknya.
- Pengembangan kebudayaan nasional dan daerah.
- Pengembangan dan pendalaman desentralisasi dan otonomi daerah

- Pengembangan pengakuan hak-hak asasi manusia.
- Peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga dan peran perempuan.
- Pemberantasan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Ekonomi dan Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Sejahtera

- Perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja.
- Penghapusan kemiskinan.
- Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial, termasuk infrastruktur pertanian, pedesaan, kaitan pedesaan-perkotaan, dan Indonesia Timur.
- Revitalisasi pertanian dan pedesaan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup petani dan rumah tangga petani.
- Pengembangan ragam aktivitas ekonomi pedesaan dengan mendorong industrialisasi pedesaan.
- Pelaksanaan reforma agraria.
- Pengembangan aktivitas ekonomi kelautan dan kawasan pesisir serta peningkatan kesejahteraan kehidupan nelayan.
- Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta usaha informal.
- Pengembangan akses petani, nelayan, UMKM, dan usaha informal terhadap sumber permodalan, informasi, serta kepastian dan perlindungan hukum.
- Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional, khususnya sektor riil.
- Peningkatan kinerja dan stabilitas ekonomi makro.

- Pengelolaan fiskal, termasuk hutang publik, secara lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
- Pengembangan fiskal yang mendorong tumbuhnya sektor riil, kesempatan kerja, dan hak-hak dasar rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.
- Peningkatan upaya-upaya penyehatan dan penertiban lembaga keuangan dan perbankan.
- Pengelolaan aset-aset negara secara efisien dan bertanggung jawab.
- Restrukturisasi dan profesionalisasi usaha-usaha sektor publik melalui debirokratisasi dan depolitisasi.
- Pengembangan ekonomi pasar yang berdasarkan hukum yang berkeadilan serta praktek ekonomi yang berlaku secara internasional.
- Peningkatan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara.
- Pengembangan industri manufaktur, pariwisata, dan IT yang memiliki daya saing dan responsif terhadap penyerapan tenaga kerja.
- Peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan dan keterampilan yang lebih berkualitas.
- Pengembangan fasilitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik.
- Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, TNI, Polri, dan pensiunan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.
- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas.
- Pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi rakyat miskin.

- Peningkatan kesejahteraan rumah tangga, perempuan, dan anak terutama golongan miskin, penyandang cacat, serta yang tinggal di daerah terpencil dan di daerah konflik.
- Penghapusan ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik dalam berbagai bentuknya.
- Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup.
- Perbaikan kualitas, proses, dan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang menjamin mobilitas barang, jasa, manusia, dan modal serta pelayanan publik.⁵

Dalam program kerja tersebut porsi ekonomi dan kesejahteraan lebih banyak dari pada point pertama pertahanan, keamanan, politik, sosial dan point kedua keadilan, hukum, HAM, demokrasi ini dimungkinkan karena permasalahan perekonomian Indonesia merupakan satu tantangan bagi pemerintahan yang sedang menjabat untuk menyelesaikannya dan menjadikannya menjadi lebih baik karena dapat menjadi indikasi berhasil atau gagalnyapemerintahan tersebut. Sektor ekonomi merupakan aspek yang paling mudah dirasakan oleh masyarakat luas di Indonesia oleh karena itu mengapa sektor ekonomi menjadi sebuah bidang yang harus ditangani lebih cepat dan

C. Kondisi Ekonomi Indonesia, Kebijakan Pemerintah dan Implikasi Program Kerja

Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2005 menjadi titik awal perbaikan ekonomi untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 6 %, dimana seperti yang telah diketahui pada tahun-tahun sebelumnya hanya tercapai antara 4 – 5 %. Pemerintah menyebutkan kondisi yang optimis dalam memandang perekonomian pada tahun 2006, yaitu dengan sasaran menurunkan jumlah penduduk miskin maupun pengangguran terbuka. Pandangan optimis ternyata belum cukup, kondisi perekonomian Indonesia masih dianggap cukup beresiko, meskipun cadangan devisa Indonesia tahun 2004 & 2005 termasuk tinggi, antara US\$ 35,93 milyar s/d US\$ 34,72 milyar, namun belum menjamin semuanya. Permasalahan perekonomian tetap dianggap menjadi penghalang bagi tumbuhnya ekonomi Indonesia, termasuk juga sebagai penghambat bagi pembangunan nasional & penanaman modal asing (FDI / *Foreign Direct Investment*).

Kondisi perekonomian Indonesia dalam perkembangannya merupakan gambaran dari suatu proses panjang sebagai sebuah indikator efektivitas dari kinerja pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden beserta kabinetnya. Terkait dengan kinerja dari tim ekonomi kabinet Susilo Bambang Yudhoyono setelah reshuffle pada awal Desember 2006, masyarakat menunjukkan sentimen yang positif akan susunan yang baru. Pergantian ini dilakukan adalah karena munculnya persepsi publik tentang kinerja sebelumnya yang kurang efektif dengan berbagai alasan latar belakangnya. Bagaimanapun ada beberapa hal yang disebutkan menjadi penyebab

persepsi ini, yaitu lambatnya pembayaran pengeluaran pemerintah berdasarkan anggaran yang direncanakan (ditunjukkan dengan angka pertumbuhan konsumsi pemerintah yang tinggi pada semester awal 2005), kondisi ini menyebabkan departemen-departemen pemerintah pusat maupun daerah tidak dapat memaksimalkan penggunaan dari anggaran yang telah tersedia. Adanya kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang rendah dengan dan menurun, dimana perkembangan yang ada dan telah dicapai dinilai kecil bagi kebutuhan Indonesia akan perbaikan dan ekspansi infrastruktur. Keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri yang tidak populer dan adanya dugaan konflik kepentingan berhubungan dengan Aburizal Bakrie sebagai salah satu menteri anggota kabinet tim ekonomi.

TABEL 2. INDIKATOR EKONOMI INDONESIA (2002 – 2006)

No	Indikator	2002	2003	2004	2005	2006
1	Nilai PDB Harga Konstan Tahun 2000 (Rp triliun)	1,506.10	1,579.60	1,656.8	1,750.7	1,846.7
2	Pertumbuhan PDB (%)	4.38	4.88	5.13	5.6	5.48
3	Inflasi (%)	10.03	5.06	6.4	17.11	6.6
4	Total Ekspor (USD milyar)	57.0	55.6	69.7	85.57	100.69
5	Ekspor Non Migas (USD milyar)	44.9	43.1	54.1	66.32	79.52
6	Total Impor (USD milyar)	31.2	29.5	46.2	57.55	61.08
7	Impor Non Migas (USD milyar)	24.8	22.6	34.6	40.16	42.10
8	Neraca Perdagangan (USD milyar)	25.8	26.1	23.5	27.96	39.61
9	Neraca Transaksi Berjalan (USD milyar)	4.7	4.0	2.9	0.93	3.42 (1)
10	Cadangan Devisa (USD milyar, akhir tahun)	32.0	36.3	35.93	34.72	43.27
11	Posisi Utang Luar Negeri (USD milyar)	131.3	135.4	136.1	133.5	131.8 (2)
12	Rupiah/USD (Kurs Tengah Bank Indonesia)	8,940	8,330	9,355	9,830	9,020
13	Total Penerimaan Pemerintah (Rp triliun)	299.0	340.7	407.5	516.2	539.4 (*)
14	Total Pengeluaran Pemerintah (Rp triliun)	244.0	258.1	306.1	542.4	559.3 (*)
15	Defisit Anggaran (Rp triliun)	-23.2	-37.7	-17.4	-26.18	-19.9 (*)
16	Uang Primer (Rp triliun)	138.3	136.5	199.7	239.8	264.5 (3)
17	Uang Beredar (Rp triliun)					
	a. Arti Sempit (M1)	191.9	207.6	253.8	281.9	346.4 (4)
	b. Arti Luas (M2)	883.9	911.2	1,033.50	1,203.20	1,325.7 (4)
18	Dana Pihak Ketiga Perbankan (Rp triliun)	845.0	866.3	965.1	1,134.10	1,244.9 (4)
19	Kredit Perbankan (Rp triliun)	365.4	411.7	553.6	689.7	749.9 (4)
20	Suku Bunga (% per tahun)					
	a. SBI satu bulan	12.9	8.1	7.4	12.75	9.75
	b. Deposito 1 bulan	12.8	7.7	6.4	11.98	8.96
	c. Kredit Modal Kerja	18.3	15.8	13.4	15.92	15.07
	d. Kredit Investasi	17.8	16.3	14.1	15.43	15.1
21	Persetujuan Investasi					
	- Domestik (Rp triliun)	25.3	16.0	36.80	50.58	157.53 (3)
	- Asing (US\$ milyar)	9.7	6.2	10.3	13.58	13.89 (3)
22	IHSG BEJ	424.9	742.5	1,002.20	1,162.60	1,805.5
23	Nilai Kapitalisasi Pasar BEJ (Rp triliun)	268.4	411.7	679.9	758.4	1,249.1

1) Triwulan I-III

2) Posisi akhir triwulan I 2006

*) dalam APBN 2006

3) Posisi akhir November 2006

4) Posisi akhir Oktober 2006

Sumber : BPS, BI & JSX (dari Laporan Ekonomi Bulanan KADIN – 2007)⁶

Berdasarkan informasi tentang Indikator Ekonomi Indonesia (tabel 2) dapat dilihat bahwa dibalik angka-angka positif peningkatan total ekspor, cadangan devisa, kurs terhadap dolar AS yang menguat & stabil, tingkat SBI yang menurun, IHSG paling tinggi (lima tahun terakhir), peningkatan GDP, dll ada kalanya bahwa angka-angka tersebut belum dapat dijadikan sebuah indikasi penuh dari kinerja ekonomi

⁶ Laporan Ekonomi Bulan 2006, DR. Tulus Tmabunan (diakses 18 juli 2010) dari <http://www.kadin-indonesia.or.id/id/doc/LaporanEkonomiBulananDes06.pdf>

Indonesia saat ini. Hampir sebagian besar indikator ini terlihat mengalami peningkatan termasuk pada GDP Indonesia yang pada tahun 2006 tercatat sebesar Rp. 1.846,7 triliun namun ternyata menjelang pertumbuhannya melambat pada dua tahun terakhir (2005 – 5,6 %, 2006 – 5,48 %). Inflasi pada tahun 2005 juga mencatat rekor inflasi tertinggi pada lima tahun terakhir yaitu 17,11 % yang sangat jauh meninggalkan kisaran 4 – 6 % pada tahun-tahun yang lain.

Dari analisa 'Perkembangan Ekonomi Indonesia' oleh KADIN pada bulan Februari 2007 disebutkan bahwa meskipun stabilitas ekonomi makro dapat terjaga dengan cukup baik, namun hal tersebut tidak berhasil membangkitkan rasa optimis di kalangan masyarakat. Tingginya tingkat ketidakpastian di kalangan dunia usaha merupakan penyebab utama dari rendahnya tingkat investasi sepanjang tahun 2006 lalu, dan ini tidak lepas dari tidak kunjung kondusifnya iklim usaha di sektor produksi riil. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat dikatakan tidak efektif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif karena seringkali dibayangi oleh keragu-raguan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Berkaitan dengan kenyataan tersebut pemerintah diharapkan dapat mengawasi kondisi perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah tidak dapat jika mengandalkan stabilitas nilai tukar dapat tercapai dan tingkat inflasi yang terkendali. Harus dipahami bahwa kondisi sektor riil dapat berubah menjadi kondisi yang sangat rawan.

Laporan tersebut menyatakan bahwa meskipun perbaikan investasi belum senerti yang diharapkan fundamental ekonomi Indonesia sudah berada pada jalur

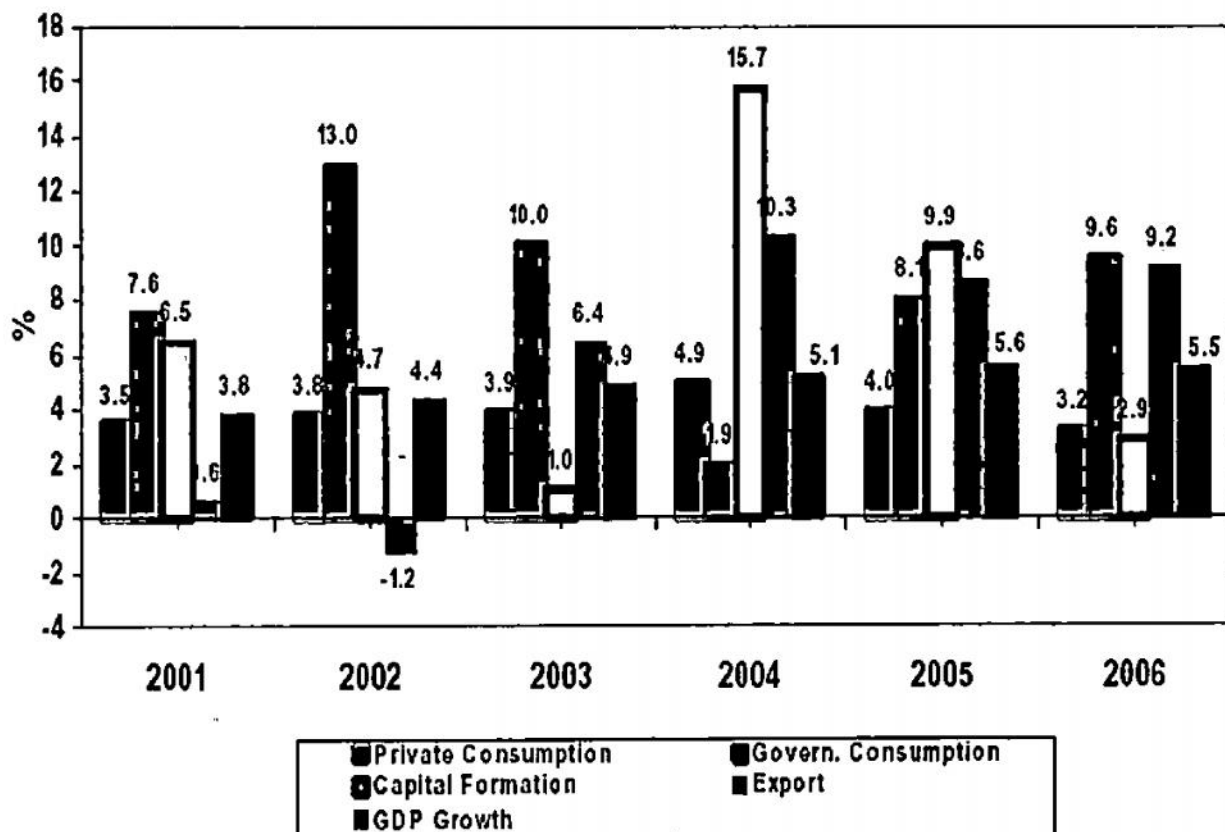
yang tepat. Stabilitas makro ekonomi dapat terjaga dengan baik dengan kurs rupiah yang menguat, sehingga tingkat inflasi dapat terus ditekan dan suku bunga perbankan diturunkan. Kondisi ini dapat terlihat dimana selama tahun 2006 kurs rupiah mengalami apresiasi sekitar 8,2 % dan selama dua bulan pertama tahun 2007 dapat dikatakan relatif stabil pada kisaran sekitar Rp 9.100 per dollar AS. Angka inflasi yang melonjak tinggi pada tahun 2005 (17,1%) turun menjadi 6,6 % pada tahun 2006, dan diperkirakan akan terus terkendalikan selama tahun 2007. Meskipun demikian, ekonomi Indonesia juga disebutkan sebagai perekonomian yang beresiko dimana pada saat tertentu kembali goncang masih memungkinkan terjadinya krisis moneter kedua.

Selama ini pola pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk bercirikan *consumption driven growth* dibandingkan *investment led growth* dan kondisi perekonomian Indonesia sebenarnya masih jauh dari berkualitas. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan, dalam hal ini kebijakan & upaya pemerintah dalam pendapatan seperti yang digambarkan dalam GDP banyak berkontribusi melalui peningkatan konsumsi pemerintah (lihat grafik 1, 2004 – 2006), dibandingkan hasil dari manfaat pembangunan & keberhasilan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor-sektor lain yang masih rendah (lihat grafik 2) serta pembangunan seperti pada kawasan timur Indonesia yang masih tertinggal karena sebagian besar terpusat di kawasan barat khususnya di kepulauan Jawa. Disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini masih jauh dari berkualitas adalah karena adanya indikasi *trickle un effect* dalam

proses pembangunan di Indonesia dimana terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin lebar.

Korupsi dianggap sebagai resiko bisnis dan investasi yang cukup besar di Indonesia. Selain faktor tersebut kondisi tersebut juga diperburuk dengan faktor ketidakpastian hukum dan tidak efisiennya birokrasi di Indonesia. Bagi pengusaha besar asing dan investor luar negeri, demokrasi merupakan faktor nomor dua sedangkan faktor yang paling dibutuhkan adalah stabilitas dan keamanan investasi.

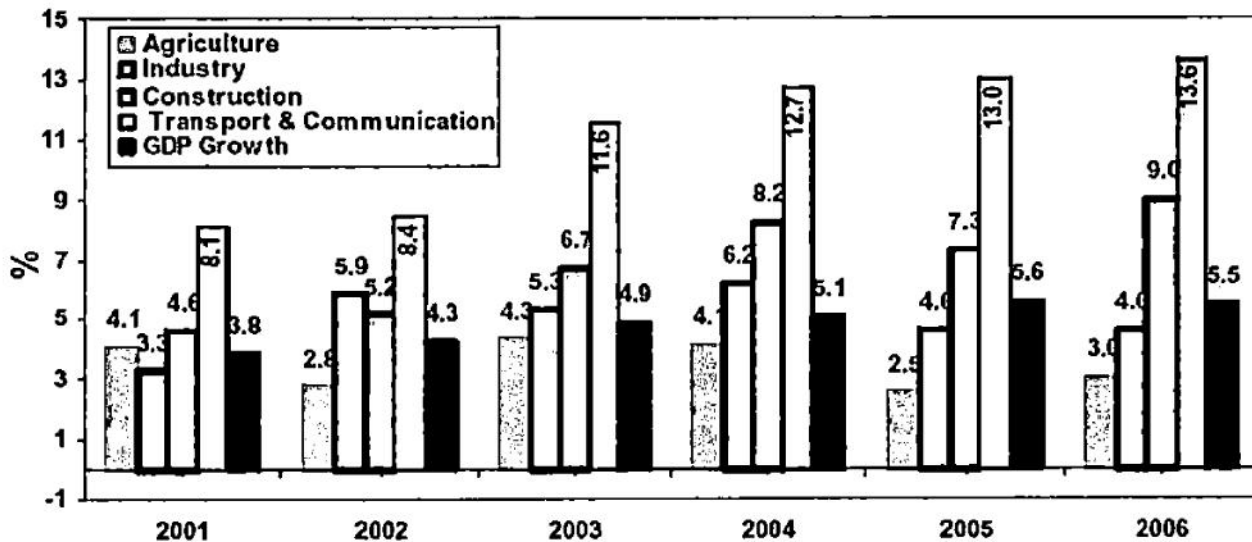
GRAFIK 1. PROSENTASE PERTUMBUHAN GDP INDONESIA BERDASARKAN EXPENDITURE (2001 – 2006)



Sumber : Laporan Ekonomi Bulanan KADIN (2007)

GRAFIK 2. PROSENTASE GDP & BEBERAPA SEKTOR EKONOMI INDONESIA (2001 - 2006)

Sumber : Laporan Ekonomi Bulanan KADIN (2007)



Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki posisi sebagai *mostly unfree* pada urutan ke 83 dari 130 an negara. Ini diukur dari *political & civil liberties* dimana unsur yang digunakan ada 4, yaitu kebebasan pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi, pertukaran sukarela yang dikoordinasi oleh pasar, kebebasan untuk masuk dan berkompetisi di pasar, serta perlindungan hak milik pribadi dari agresi orang lain. Definisi kebebasan ekonomi disini adalah tidak adanya kekangan pemerintah dalam hal produksi, konsumsi dan distribusi barang-barang demi melindungi kebebasan itu sendiri, intinya adalah semakin kecil peran pemerintah maka tingkat kebebasannya semakin tinggi

Posisi Indonesia saat ini sebenarnya Indonesia belum cukup liberal dalam menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi, dimana disebutkan dalam artikel ini bahwa kurang efisien & efektifnya pengambilan keputusan dalam regulasi ini dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Disebutkan juga bahwa masalah lain adalah birokrasi pemerintah yang belum mendukung kebijakan regulasi ekonomi, serta masih adanya proteksi-proteksi di beberapa sektor terkait peran pemerintah sebelum krisis moneter sampai saat ini.

Donatus K. Marut (Direktur Eksekutif INFID) juga mengatakan bahwa selama ini Indonesia tidak bebas menentukan kebijakan dalam negeri selama masih menjalin hubungan dengan IMF dan Bank Dunia, karena bagaimanapun **Bank Dunia & IMF seringkali menekan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang pada akhirnya justru memberatkan Indonesia di masa depan.** Salah satu yang dilakukan adalah menekan pemerintah merevisi UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan yang dianggap pro buruh dibandingkan investasi. Kalau pada akhirnya pemerintah berupaya untuk mempercepat pembayaran pinjaman pada IMF maka dapat diinterpretasikan dalam dua sudut pandang, pertama bahwa kondisi perekonomian semakin membaik dan pemerintah berupaya untuk memperlihatkan cerminan kondisi tersebut kepada dunia internasional, sedangkan kedua adalah pemerintah mengurangi resiko tekanan-tekanan tambahan dari IMF dalam merevisi atau mengubah kebijakan-kebijakan yang dimiliki saat ini.

Cadangan devisa pemerintah Indonesia 2007 diperkirakan sebesar 39,5 milyar dolar AS merupakan jumlah setelah dikurangi pelunasan pinjaman pada IMF sebesar

7,8 milyar dolar AS. Pembayaran pinjaman IMF ini dipercepat 4 tahun dari semula dan pada akhir tahun 2006 (tepatnya bulan oktober) ini telah dibayarkan sisanya sebesar 3,2 milyar dolar AS, meski cadangan devisa menurun tapi nilai tukar / kurs rupiah terhadap USD tetap kuat. Pada bulan Mei 2007 ini cadangan devisa Indonesia tercatat mengalami peningkatan menjadi 50,112 milyar dolar AS berdasarkan data yang didapatkan dari website Bank Indonesia.

Kesimpulan tentang kondisi ekonomi Indonesia menjelang tiga tahun terakhir (2005 – 2007) disebutkan bahwa tahun 2006 diawali dengan keadaan yang kurang menguntungkan disebabkan karena kenaikan harga BBM yang pada Oktober 2005 yang telah menimbulkan tekanan inflasi yang tinggi. Kebijakan tidak populis ini adalah tekanan bagi pemerintah karena komitmen untuk mengurangi subsidi BBM adalah salah satu agenda penting yang tidak mudah untuk diterima oleh masyarakat. Meskipun pada akhirnya bentuk subsidi ini dialihkan ke sektor lain, namun dalam aktivitas sehari-harinya masyarakat merasa diberatkan dengan harga BBM yang terkait dengan pengeluaran rutin mereka. Laju inflasi mencapai 17,1% pada akhir 2005. Untuk menjaga agar laju inflasi menjadi lebih terkendali, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sampai 12,75% di akhir tahun 2005. Akibatnya, ekonomi nasional mengalami perlambatan secara signifikan ketika kita memasuki tahun 2006.

Menjelang tutup tahun 2006, tingkat inflasi Indonesia cenderung membaik dan SBI mencapai single digit menjadi 9,75 % dibandingkan tahun sebelumnya yang masih dua digit (lihat tabel 2), inflasi pun tidak menembus double digit seperti tahun

sebelumnya (lihat tabel 2). Masalah utama Indonesia adalah memburuknya sektor riil karena diterjang kenaikan harga pokok akibat masalah ekonomi termasuk pungutan daerah otonom, birokrasi dan biaya bunga tinggi, UU Pajak dan SDM yang belum mampu memikat investasi, menyikapi kondisi ini masih dapat didorong APBN dan gerakan BUMN sebagai stimulus sektor riil tahun 2007. Stabilitas ekonomi 2006 yang membaik akan menjadi dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2007, dimana pertumbuhan diupayakan di atas 6 % (lihat tabel 2) untuk penyediaan lapangan kerja dan mengurangi jumlah orang miskin sampai 2010. Angka pertumbuhan konsumsi, investasi, ekspor, serta PDB diharapkan mengalami peningkatan (lihat tabel 2) dan sebagian terlihat lebih baik dibandingkan pada kuartal I tahun 2006 (kecuali pada pertumbuhan ekspor).

TABEL 3. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI 2006 – 2007 (%)

	2006					2007
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1
PDB	5.0	5.0	5.9	6.1	5.5	6.0
PDB Non Migas	5.7	5.4	6.6	6.6	6.1	6.5
Non Keuangan	5.9	5.7	6.9	6.7	6.3	6.6
Pemintaan Domestik	1.0	3.0	6.4	7.6	4.5	5.4
Konsumsi	2.9	3.0	3.0	3.8	3.2	4.5
Investasi	1.1	1.1	1.3	8.2	2.9	7.5
Ekspor	11.6	11.3	8.2	6.1	9.2	8.9

Sumber : BPS (2007)

Ketika memasuki tahun 2007, perekonomian nasional mengalami percepatan pertumbuhan. Mulai pulihnya daya beli konsumen, prospek laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, serta kondisi pertumbuhan ekonomi dunia yang sehat akan

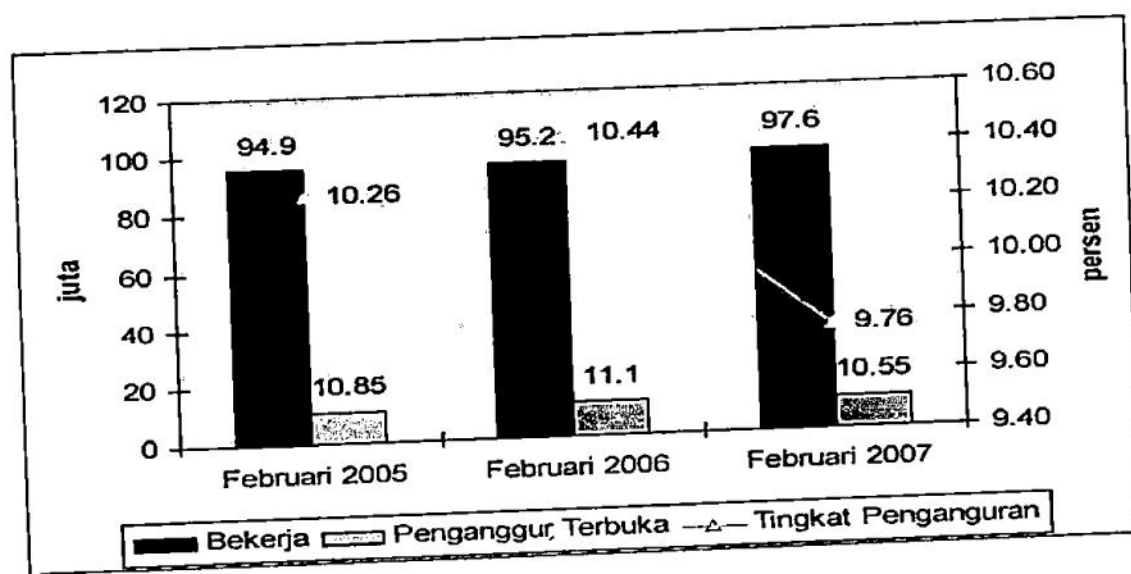
mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat pada 2007. Pemerintah tetap melihat bahwa arus investasi khususnya dari luar negeri merupakan salah satu cerminan kepercayaan akan kinerja ekonomi yang telah dilakukan selama ini. Masuknya modal asing khususnya berbentuk investasi langsung yang membangun fasilitas fisik & kebutuhan akan lapangan kerja merupakan bentuk yang lebih disukai dibandingkan investasi portofolio seperti pada saham yang mudah masuk dan mudah keluar.

Ada beberapa faktor yang memotivasi FDI (*foreign direct investment*) di Asia Tenggara, yaitu tersedianya tenaga kerja murah, tersedianya industri pendukung lokal, biaya pengiriman rendah, diversifikasi geografis, tersedianya tenaga kerja terampil dan partner lokal yang cocok dan disukai. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan populer dan tepat di lapangan untuk mendukung ini. Kendala-kendala lain secara sosial atau kultural mungkin adalah kecenderungan umum yang tidak mudah diubah dan perlu waktu lebih lama seperti sentimen anti globalisasi dan rendahnya produktivitas buruh. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja baru adalah mencegah munculnya kabar dan kesan buruk dengan menangani semua masalah secara hati-hati dan sesuai kebutuhan, melakukan verifikasi untuk setiap kabar baik yang bisa mendukung kinerja ekonomi termasuk juga penciptaan stabilitas, pencegahan relokasi perusahaan atau industri dengan membicarakannya secara dua arah sehingga menjadi promosi yang baik akan keseriusan pemerintah, serta perbaikan dan penyelesaian masalah khususnya dalam hal tenaga kerja atau perburuhan, karena bagaimanapun investor tertarik pada *net*

incentive bukan sekedar pemberian *tax break* saja. Sehubungan dengan lapangan kerja tersebut, pada grafik 3 dapat dilihat bagaimana perkembangan mengenai tingkat pengangguran di Indonesia menjelang 3 tahun terakhir (sejak Februari 2005 – Februari 2007).

Dalam kurun waktu Februari 2005 - Februari 2007 terlihat telah terjadi penurunan jumlah penganggur terbuka sebesar 300 ribu. Penurunan jumlah penganggur akan lebih besar jika kita membandingkan tahun lalu dimana jumlah penganggur mencapai puncaknya yaitu pada bulan Februari 2006 yaitu 11,1 juta, sehingga pada Februari 2007 jumlah penganggur terbuka menurun sebesar 550 ribu. Dengan memperhitungkan tambahan angkatan kerja baru, maka dalam 2 tahun terakhir (Februari 2007 – Februari 2005) telah tercipta 2,68 juta kesempatan kerja baru. Tambahan kesempatan kerja baru terbesar terjadi dalam 1 tahun terakhir yaitu 2,38 juta kesempatan kerja (Siaran Pers Pemerintah RI – 15 Mei 2007).

GRAFIK 3. PERKEMBANGAN KESEMPATAN, PENGANGGURAN & TINGKAT PENGANGGURAN (Februari 2005 – 2007)



Sumber : Siaran Pers Pemerintah RI (15 Mei 2006)

Selain lapangan kerja, masih perlu diberikan perhatian lebih tentang kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah, yaitu perlu diadakan harmonisasi antara kementerian perdagangan & industri bersama dengan kementerian tenaga kerja, harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah, memperkuat aspek-aspek hukum untuk menghindari ketidakpastian, pengembangan infrastruktur, serta perlu adanya pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel dimana ada persetujuan dan kesepakatan sendiri antara perusahaan dan pekerja. Program jangka pendek yang dapat dilakukan pemerintah antara lain dengan membangun kredibilitas melalui penciptaan image positif dalam bidang ketenagakerjaan dan aspek legal atau hukum, program kedua adalah mengurangi biaya transaksi dan ketidakpastian terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Upaya pemerintah saat ini dengan melakukan pengkajian atas peraturan-peraturan daerah dan penghapusan atas kebijakan yang tidak efektif menjadi awal yang baik, kondisi ini juga didukung oleh upaya dari sektor pajak untuk menerapkan konsep pajak terbuka dimana wajib pajak dapat langsung terhubung secara online dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Otomatis ini juga akan mengurangi hubungan yang tidak perlu antara petugas pajak dan wajib pajak. Kendala yang mungkin muncul adalah *knowledge gap* yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melakukan metode yang terotomatisasi ini serta metode yang berkaitan dengan koneksi internet